

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat PT.PLN (Persero) DJB

Bangunan tua peninggalan Belanda yang letaknya persis di sisi sungai Cikapundung, bersebelahan dengan Gedung Merdeka (Sebuah gedung tua tempat pertama Konferensi Asia Afrika digelar di Kota Bandung) seakan menjadi simbol kasat mata yang mampu menuturkan panjangnya perjalanan penyediaan tenaga listrik di Bumi pasundan, sejak dulu,kini dan esok hari.Gedung lawas hasil polesan arsitek Belanda yang kini dibalut cat tembok warna abu-abu muda dipadu dengan warna biru tua itu,seakan menjadi saksi bisu sejarah kelistrikan di Tatar Parahyangan .

Berawal di tahun 1905,saat itu dikota Bandugn berdiri perusahaan listrik milik pemerintah Kolonial Belanda dengan nama *Bandoengsche Electriciteit Maatschaappy (BEM)*.Selanjutnya BEM diubah menjadi perusahaan perseroan dengan nama *Gemeenschaplijk Electriciet bedrijf voor Bandoeng (GEBEO)*.Perubahan kembali terjadi,ketika pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia diantara rentang waktu 1942-1945.Pada saat itu, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Jepang dengan nama Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha. Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Penguasaan pengelolaan Tenaga Listrik ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia.Salah satunya ditandai dengan terbentuknya perusahaan listrik di Jawa Barat dengan nama PLN Eksploitasi XI pada tahun 1961 hingga pertengahan tahun 1975.

Kemudian pada kurun waktu 1975-1994, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi perusahaan umum (perum) Listrik Negara Distribusi Jawa Barat. Di tahun 1994, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kelistrikan yang bergerak begitu cepat, Badan Hukum PLN mengalami perubahan dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi perseroan. Perubahan ini turut mengubah nama Perusahaan Listrik Jawa Barat menjadi PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat. Oleh karena wilayah kerjanya tidak hanya menjangkau

Jawa Barat saja, tetapi juga Provinsi Banten maka sejak tanggal 27 Agustus 2002 hingga saat ini nama PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dilengkapi menjadi PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Namun hingga kini akhirnya Banten memisahkan diri dari Jawa Barat dan akhirnya hanya menjadi PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat. Dan kini bangunan ini masih menempati bangunan lawas bernilai sejarah yang beralamat di Jl. Asia Afrika No 63 Bandung.

## **2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi**

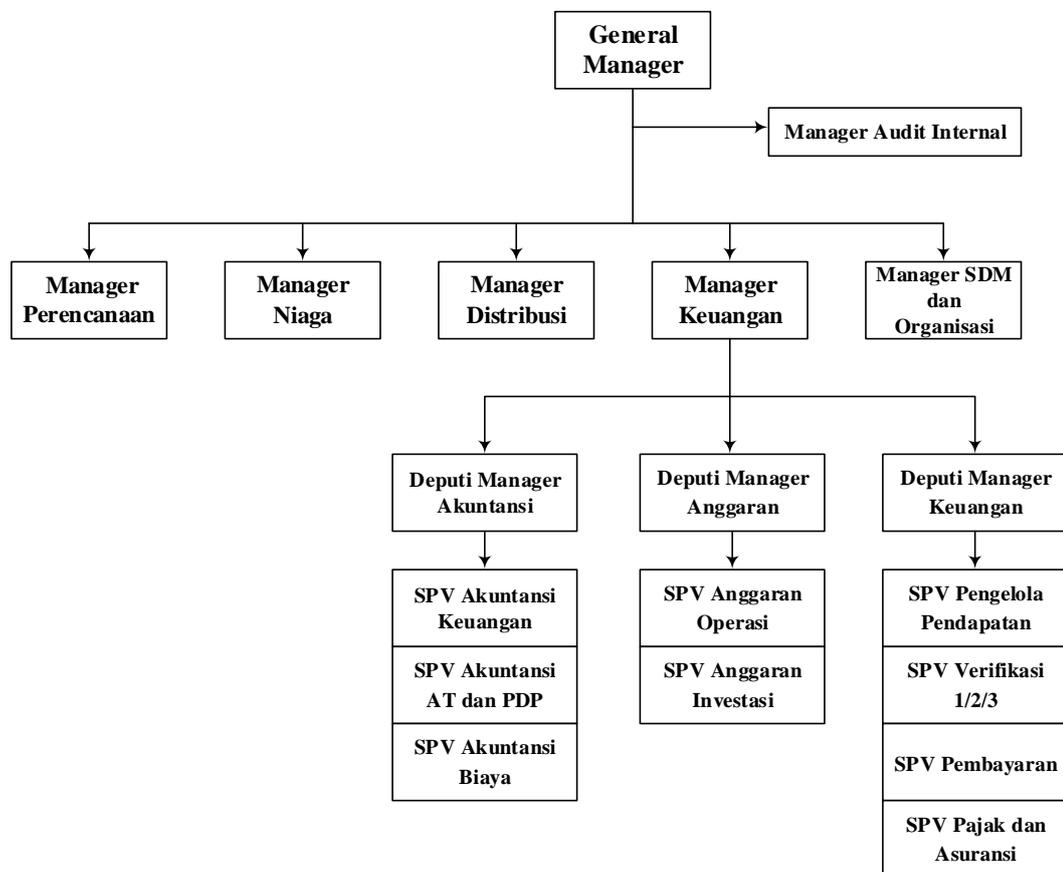
### **2.2.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Struktur organisasi PT PLN (persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat merupakan organisasi garis, fungsional, dan staf jenjang manajemen, meliputi unsur pimpinan, unsur pengawas dan unsur pelaksanaan, selain itu ada juga kontrol intern yang berada dibawah serta tanggung jawab langsung kepada pimpinan dapat dilihat secara keseluruhan bahwa susunan organisasi di PT PLN (persero) Unit Bisnis Jawa Barat sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan adalah General Manajer
- b. Unsur pembantu pimpinan, meliputi ;
  1. Perencanaan dan pengembangan usaha
  2. Distribusi
  3. Niaga
  4. Keuangan
  5. Organisasi dan SDM
  6. Administrasi, Hukum dan Komunikasi
- c. Unsur Perusahaan Meliputi;
  1. Cabang/Unit
  2. Area

### 2.2.2 Diagram Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Gambar struktur organisasi PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT.PLN (persero) DJB

### **2.3 Uraian Tugas Perusahaan/Instansi**

Dalam tataran pembagian jabatannya, masing-masing bagian memiliki Job Description yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

#### **2.3.1 General Manager (GM)**

- a. Pemimpin PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat.
- b. Membentuk Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) yang membawahi Unit Jaringan (UJ).
- c. Menetapkan Formasi Jabatan dan Informasi Tenaga Kerja Manajer Bidang dan Kepala Audit Internal.
- d. Menetapkan Formasi jabatan dan formasi kerja Manajer Area pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD).

#### **2.3.2 Audit Internal**

- a. Menyusun program kerja pemeriksaan tahunan, sesuai program kerja perusahaan.
- b. Melaksanakan audit internal, meliputi keuangan, teknik, manajemen dan operasional
- c. Memonitori tindak lanjut temuan hasil audit internal.
- d. Menyusun laporan manajemen.

#### **2.3.3 Manager Perencanaan**

- a. Menyusun Rencana Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL), Rencana Jangka Panjang.
- b. Menyusun rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan
- c. Menyusun sistem manajemen kinerja unit-unit kerja.
- d. Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian finansialnya.
- e. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan penyandang dana, baik secara bilateral maupun multilateral.
- f. Menyusun rencana pengembangan sistem teknologi informasi.
- g. Menyusun rencana pengembangan aplikasi sistem informasi
- h. Mengendalikan aplikasi-aplikasi teknologi informasi.

- i. Menyipakan SOP pengelolaan aplikasi sistem informasi.
- j. Menyusun laporan manajemen
- k. Menyusun rencana pengembangan usaha baru serta penetapan pengaturannya.

#### **2.3.4 Manager Niaga**

- a. Menyusun ketentuan dan strategi pemasaran.
- b. Menyusun rencana penjualan energi dan rencana pendapatan.
- c. Mengevaluasi harga jual listrik.
- d. Menghitung biaya penyediaan tenaga listrik.
- e. Menyusun strategi dan pengembangan pelayanan pelanggan.
- f. Menyusun ketentuan data induk pelanggan (DIL) dan data induk saldo (DIS) serta kontrak jual beli tenaga listrik.
- g. Mengkaji pengelolaan pencatatan meter dan menyusun rencana penyempurnaannya.
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan kepada pelanggan tertentu antara lain TNI/POLRI dan instansi vertikal.
- i. Melakukan pengendalian DIS dan opname saldo piutang.
- j. Menyusun konsep kebijakan sistem informasi pelayanan pelanggan.
- k. Menyusun mekanisme interaksi antar unit pelaksanaan.
- l. Menyusun laporan manajemen.

#### **2.3.5 Manager Distribusi**

- a. Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- b. Menyusun strategi pengoperasiannya dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.
- c. Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
- d. Menyusun desain standard konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.

- e. Mengevaluasi sudut energi listrik dan gangguan pada saran pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.
- f. Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta penerapannya.
- g. Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
- h. Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.
- i. Menyusun regulasi untuk penyempurnaan Data Induk Jaringan (DIJ).
- j. Memantau dan mengevaluasi Data Induk Jaringan (DIJ).

#### **2.3.6 Manager keuangan**

- a. Mengendalikan aliran kas pendapatan dan membuat laporan rekonsiliasi keuangan.
- b. Mengendalikan anggaran investasi dan operasi serta rencana aliran kas pembiayaan.
- c. Melakukan analisis dan evaluasi laporan unit-unit serta menyusun laporan keuangan konsolidasi.
- d. Menyusun dan menganalisa kebijakan resiko dan penghapusan aset.
- e. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.
- f. Melakukan pengelolaan keuangan
- g. Bidang SDM dan Organisasi
- h. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya.
- i. Menyusun kebijakan manajemen sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya.
- j. Menyusun kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya.
- k. Mengkaji usulan pengembangan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

### **2.3.7 Bidang Komunikasi, Hukum, dan Administrasi**

- a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola pelaksanaannya.
- b. Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor.
- c. Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan community development.
- d. Menyusun kebijakan administrasi.
- e. Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.
- f. Memberikan advokasi dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.
- g. Menyusun standard fasilitas kantor.
- h. Mengelola aset tanah dan bangunan serta sarana kerja.
- i. Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.
- j. Menyusun laporan manajemen dibidangnya.

## **2.4 Deskripsi Jabatan Bagian Keuangan**

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat memiliki bagian keuangan penting demi kelangsungan perusahaan. Bagian keuangan memiliki andil yang cukup besar karena dibagian keuangan pencatatan-pencatatan serta data yang berkaitan dengan keluar masuknya uang ada dibagian keuangan. Berikut adalah bagian besar deskripsi jabatan yang ada dibagian keuangan PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

### **2.4.1 Manager Bagian Keuangan**

Manajer bagian keuangan pada PT.PLN (perseor) Distribusi Jawa Barat dan Banten membawahi tiga bidang yaitu Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang Keuangan. Sebagai pimpinan yang memiliki wewenang tertinggi di bagian keuangan, Manajer Keuangan berwenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan mengenai peraturan perusahaan dan mensosialisasikan kepada karyawan dibawahnya.

#### **2.4.2 Deputy Manajer Anggaran**

Bertugas merencanakan keuangan, menerima pengajuan dana dari distribusi atau bidang serta menyesuaikannya dengan cash budget yang telah ditentukan.

#### **2.4.3 Deputy Manajer Akuntansi**

Bertugas membuat laporan atas kegiatan keuangan yang berlangsung. Laporan yang dibuat tidak hanya digunakan oleh bidang akuntansi, tetapi juga bisa digunakan untuk menentukan keputusan managerial.

#### **2.4.4 Deputy Manager Keuangan**

Melakukan pembayaran, penandatanganan cek, mengkoordinir Proses pembayaran atas tagihan SPK dan non-SPK dengan anggaran operasi, mengkoordinir proses pembayaran atas tagihan SPK anggaran investasi, evaluasi atas surat-surat pembayaran yang dibuat untuk anggaran investasi dan operasi atas 18 area. Mengkoordinir proses pembayaran sesuai dengan PAGU disburse serta merilis tagihan-tagihan SPK dan non-SPK atas 18 area.

### **2.5 Sarana dan prasarana di PT.PLN (persero) DJB**

Sarana PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- a. Gedung perkantoran yang terdiri dari dua gedung yaitu Gedung baru atau tambahan.
- b. Ruang perkantoran antara lain :
  - a) Gedung lama dan gedung baru berada di lantai dasar, yang terdiri dari: Ruang serbaguna dan FO (*Front Office*), sedangkan disisi lain terdapat ruang divisi humas, ruang penyimpanan fasilitas kantor dan gedung, perpustakaan, gedung alat tulis kantor, ruang e-procurement (pengadaam barang melalui system computer), ruang teknik koperasi distribusi.

- b) Gedung baru atau gedung tambahan berada di lantai 1, yang terdiri dari Ruang PSDM, ruang admin SDM, ruang bagian keuangan, ruang bagian perencanaan perusahaan, dan ruang hukum.
- c) Gedung lama berada dilantai 2 yang terdiri dari : Ruang GM (*General Manager*), dan beberapa ruang manajer lainnya.
- d) Gedung lama berada dilantai 3 yang terdiri dari : Ruang bagian niaga, ruang bagian akuntansi, ruang bagian anggaran, ruang kesekretariatan, dan umum.
- e) Gedung lama berada di lantai 4, yang terdiri dari : Ruang system operasi distribuis, ruang proyek pengadaan listrik pedesaan, dan ruang serbaguna kecil.

Adapun saran lain dari PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat yang tersedia adalah sebagai berikut:

Daftar sarana PT.PLN (persero) DJB:

**Tabel 2.1 Company Profile PT.PLN (persero) DJB**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Masjid	1
2	Ruang Security	3
3	Front Office	1
4	Ruang Rapat	3
5	Aula	1
6	Lift Gedung	3
7	Tangga Darurat	3
8	Tempat Parkir	2
9	Toilet	10
10	Telpon Umum	1
11	Mesin Fotocopy	4
12	ATM BNI	1
13	Kantin	1

## **2.6 Aspek-Aspek Kegiatan PT.PLN (persero) DJB**

### **2.6.1 Aspek Produksi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 tanggal 28 Mei 1990 Pasal 5 ayat 1, bidang usaha PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat, kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi. PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang diterima di Gardu Induk (GI).

Seluruh Pulau Jawa yang mengkonsumsi hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN distribusi yang berfungsi sebagai unit koordinatif. Salah satunya adalah PT.PLN ( persero ) Distibusi Jawa Barat yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat. Tenaga listrik yang disalurkan kepada konsumen adalah tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pusat tenaga listrik yang ada di Jawa Barat. Dari pusat tenaga listrik tersebut ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk, gardu-gardu cabang dan akhirnya sampai kepada konsumen.

### **2.6.2 Aspek Keuangan**

Pendapatan PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat 30 % berasal dari modal sendiri yaitu dari hasil kegiatan usahanya berupa penjualan tenaga listrik kepada pelanggan ,jasa penyambungan pelanggan dan lain-lain. Selain itu, PT PLN ( persero) Distribusi Jawa Barat menerima subsidi dari pemerintah sebanyak 70%. Dana yang diperoleh PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya.

### **2.6.3 Aspek Pemasaran**

Dalam menjual produknya, PT PLN (persero) Daitribusi Jawa Barat tidak memiliki kewenangan dalam menentukan harga jual produknya, melainkan sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah yang dituangkan melalui Keputusan Presiden (KEPPRES). Harga jual listrik sampai saat

masih mengacu pada Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2003 ditetapkan melalui KEPPRES No. 89 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002.

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat berupaya memenuhi keinginan masyarakat untuk pasang baru dan tambah daya melalui Biaya Penyambungan Solusi ( BP solusi) atau dapat juga disebut Biaya Penyambungs Mandiri melalui *self financing by customer* . untuk kemudahan pelaksanaan dan pedoman seluruh unit dalam mensukseskan Solusi Mandiri Layanan yang ada di PT PLN ( persero) Distribusi Jawa Barat. Solusi Mandiri Layanan dapat dikategorikan menjadi beberapa layanan yaitu Layanan post paid (LPP), Layanan Pra Bayar (LPB), Layanan Multiguna Sementara (LMS), dan Layanan lainnya

#### **2.6.4 Aspek Sumber Daya Manusia**

PT.PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menetapkan beberapa kebijakan dasar dalam proses rekrutmen. Persusahaan melakukan rekrutmen melalui *Direct Shopping* dan *Job fair* yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam tiga kelompok kegiatan rekrutmen yaitu : rekrutmen S1/D4/D3, rekrutmen program D3 kerja sama, dan rekrutmen operator PLTU.

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, PT PLN (persero) Distribusi Jawa Barat menjalankan program pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas. Seperti membuat program pendidikan dan pelatihan karyawan yang difokuskan pada pengembangan kepemimpinan, mendukung pencapaian *corporate strategic goals*, dan mengurangi kesenjangan kompetensi karyawan .